

Judul : DPR Kritik kebijakan kendaraan listrik
Tanggal : Rabu, 24 Mei 2023
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 2

Tantangan Indonesia dalam Transisi Energi

- 1 Rendahnya persentase penggunaan energi baru terbarukan pada pembangkit listrik di Tanah Air, yakni baru sekitar 4%-6%.
- 2 Ketersediaan dana yang diperlukan untuk beralih menggunakan energi baru terbarukan yang diperkirakan mencapai Rp3.799 triliun.
- 3 Kebijakan Uni Eropa tentang pengenaan tarif untuk produk-produk yang dikategorikan tidak ramah lingkungan atau non-green.

Kritik Jusuf Kalla

- Program kendaraan listrik menyumbang polusi udara melalui pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).
- Kebijakan kendaraan listrik harus diselaraskan dengan kesiapan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) untuk mengurangi polusi udara.
- Ekosistem kendaraan listrik harus dikuasai tenaga kerja dalam negeri.

Manfaat Penggunaan Kendaraan Listrik

- Mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil.
- Mengurangi impor BBM.
- Mengurangi emisi gas rumah kaca atau karbon dioksida.

Sumber: ESOW/SepertiLangit.MI

DPR Kritik Kebijakan Kendaraan Listrik

DEWAN Perwakilan Rakyat menyoroti serangkaian kebijakan mobil listrik yang dijalankan pemerintah. Kebijakan itu dinilai hanya dapat dimanfaatkan oleh segelintir kalangan.

Kritik mengenai kebijakan mobil listrik itu disampaikan dalam Rapat Paripurna Ke-24 Masa Sidang V Tahunan Persidangan 2022-2023 dengan agenda tanggapan fraksi atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2024, kemarin.

Dari Fraksi PDIP, misalnya, menyoroti ihwal intervensi pemerintah yang cukup kuat pada kebijakan mobil listrik. Padahal, sektor-sektor strategis lainnya juga membutuhkan campur tangan yang lebih dari pemerintah.

"Intervensi pemerintah itu jangan hanya mobil listrik saja, tapi juga sektor kerakyatan," kata juru bicara Fraksi PDIP Masinton Pasaribu.

Di sisi lain, Fraksi NasDem menagih dan mendorong pemerintah untuk memantapkan prinsip *spending better* pada belanja.

Juru bicara Fraksi NasDem Fauzi H Amro mendorong agar uang negara dibelanjakan untuk mendorong pemerataan ekonomi, menekan kemiskinan, dan memacu produktivitas sektor pertanian.

"Efektivitas belanja pemerintah diharapkan untuk membangun pemerataan ekonomi, mengurangi kemiskinan, memperkuat sektor pertanian, perikanan, dan pangan dihindari menggelontorkan subsidi

untuk kepentingan kendaraan listrik," jelas Fauzi.

Kritik juga disampaikan oleh Fraksi PKS terkait kebijakan insentif kendaraan listrik. Juru bicara Fraksi PKS Andi Akmal Pasluddin menyatakan insentif perpajakan dan subsidi yang diberikan kepada kendaraan listrik menunjukkan keberpihakan pemerintah kepada golongan masyarakat kelas atas.

Di tempat terpisah, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla mengingatkan bahwa kebijakan kendaraan listrik harus didukung dengan kesiapan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) sebagai pengganti pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).

"Kalau pembangkitnya tetap PLTU, itu hanya pindah emisi dari knal-

pot mobil ke cerobong PLTU," ujar Kalla.

Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menegaskan pemerintah melakukan percepatan pengembangan transportasi bersih berbasis listrik untuk mendorong target *net zero emission* atau nol emisi karbon. Itu merupakan kondisi ketika semua gas rumah kaca yang bersumber dari aktivitas manusia dihilangkan dengan menyerapnya kembali hingga mencapai level yang seimbang.

"Kebijakan bantuan pemerintah untuk pembelian kendaraan listrik roda dua dan roda empat merupakan bentuk komitmen pemerintah mewujudkan *net zero emission*," katanya. (Mir/Boh/Ind/X-5)